



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur tentang: A. Tata Cara Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Sosial adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Sosial adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA DINAS SOSIAL**

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dalam menyusun Renja Dinas Sosial dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Sosial disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL ;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL ;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Dinas Sosial berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Sosial wajib melaksanakan Renstra Dinas Sosial dalam rangka mendukung capaian Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Sosial Tahun 2027, Renstra Dinas Sosial Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Sosial Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 26

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **26** TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Sosial, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Dinas Sosial harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Renja Dinas Sosial, Dinas Sosial melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Dinas Sosial dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Sosial /lintas Renstra Dinas Sosial , Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Sosial memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Sosial yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.



DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASURUAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASURUAN



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial periode 2016-2021, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan di daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan pemerintahan. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran serta visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

Mengingat hal tersebut, maka seluruh jajaran pada Dinas Sosial harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian dan Arah Kebijakan Tahun 2024 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Pasuruan yaitu *"Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan"*

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Pasuruan, Januari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

H.M SUWITO ADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 198603 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	12
2.2 Sumber Daya	25
2.3 Kinerja Pelayanan Peraangkat Daerah	26
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	31
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis	32
3.1 Identifikasi Permasalahn Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	32
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV Tujuan dan Sasaran	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026	42
4.2 Cascading Kinerja Dinas Sosial	45
BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan	45
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan	48
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	52
BAB VIII Penutup	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang tentang kesejahteraan sosial, kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fakir miskin dan anak terlantar menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhannya (UUD RI tahun 1945). Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Isu permasalahan sosial yang muncul di masa pandemi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin, dan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

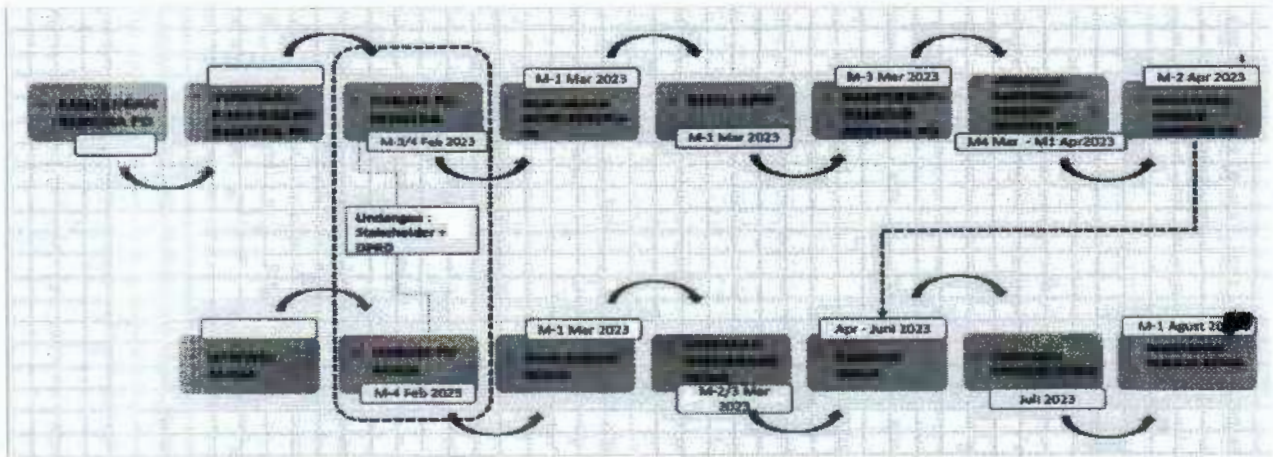
Upaya mengatasi berbagai permasalahan sosial tersebut salah satunya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah/ (RPD) dan bersifat indikatif. Oleh karena itu Dinas Sosial, Kabupaten Pasuruan Melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) seiring dengan disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Daerah/ RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026. Proses penyusunan renstra nantinya meliputi: (1) persiapan; (2) penyusunan rancangan awal Renstra; (3) penyusunan Rancangan Akhir Renstra; (4) penetapan Renstra.

Proses perencanaan Renstra Dinas Sosial tahun 2024-2026 ini memerlukan konsep perencanaan yang seimbang dan cermat mengenai sumber daya publik yang terlibat di dalamnya. Penyusunan Renstra ini melibatkan seluruh unsur dalam masyarakat sebagai suatu *entity* / kesatuan dimana di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berinteraksi satu sama lain. Melalui konsep / pendekatan perencanaan *Top down and Bottom Up* atau perencanaan partisipatif dan teknokratik. Perencanaan Partisipatif yaitu menggali data/usulan dari masyarakat sebagai bahan penyusunan perencanaan *bottom up*, sedangkan *top down* adalah perencanaan yang langsung dari atas / pemangku kebijakan.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 bersifat khusus karena disusun pada masa tidak adanya Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum sehingga tidak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menerjemahkan visi misi Bupati terpilih. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. RPD Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Selain itu Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari *system* perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah Tahun 2024-2026.

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan sebagai penjabaran RPD 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam mendukung visi dan misi bupati berdasarkan RPD 2024-2026;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan selama kurun 3 (tiga) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Peraangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

- BAB III Permasalahan dan Isu Strategis
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026
 - 4.2 Cascading Kinerja Dinas Sosial
- BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - 7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)
 - 7.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKK)
- BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

2.1.1 Uraian Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas *membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial serta tugas pembantuan.*

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Bidang Pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
- e. pelaksanaanpelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja pada masing-masing jabatan di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris mempunyai fungsi :
 1. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 2. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 3. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 4. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 5. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
 6. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Bidang Perlindungan Jaminan yang membawahi :
 1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan social korban bencana alam;
 2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan social korban bencana sosial;
 3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 4. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial dan;
 5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahi :
 1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak diluar panti dan atau/ Lembaga;
 2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan/ Lembaga;

3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/ Lembaga;
 4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan/ Lembaga;
 5. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial pekerja migran bermasalah dan orang terlantar ;
 6. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah daerah Provinsi;
 7. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk di koordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah daerah Provinsi;
 8. pengelolaan data pelayanan sosial pekerja migran bermasalah dan orang terlantar;
 9. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial; dan
 - 10 pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, yang membawahi :
1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
 2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

5. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin;
6. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin;
7. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
8. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganana fakir miskin; dan
9. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3 Struktur Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

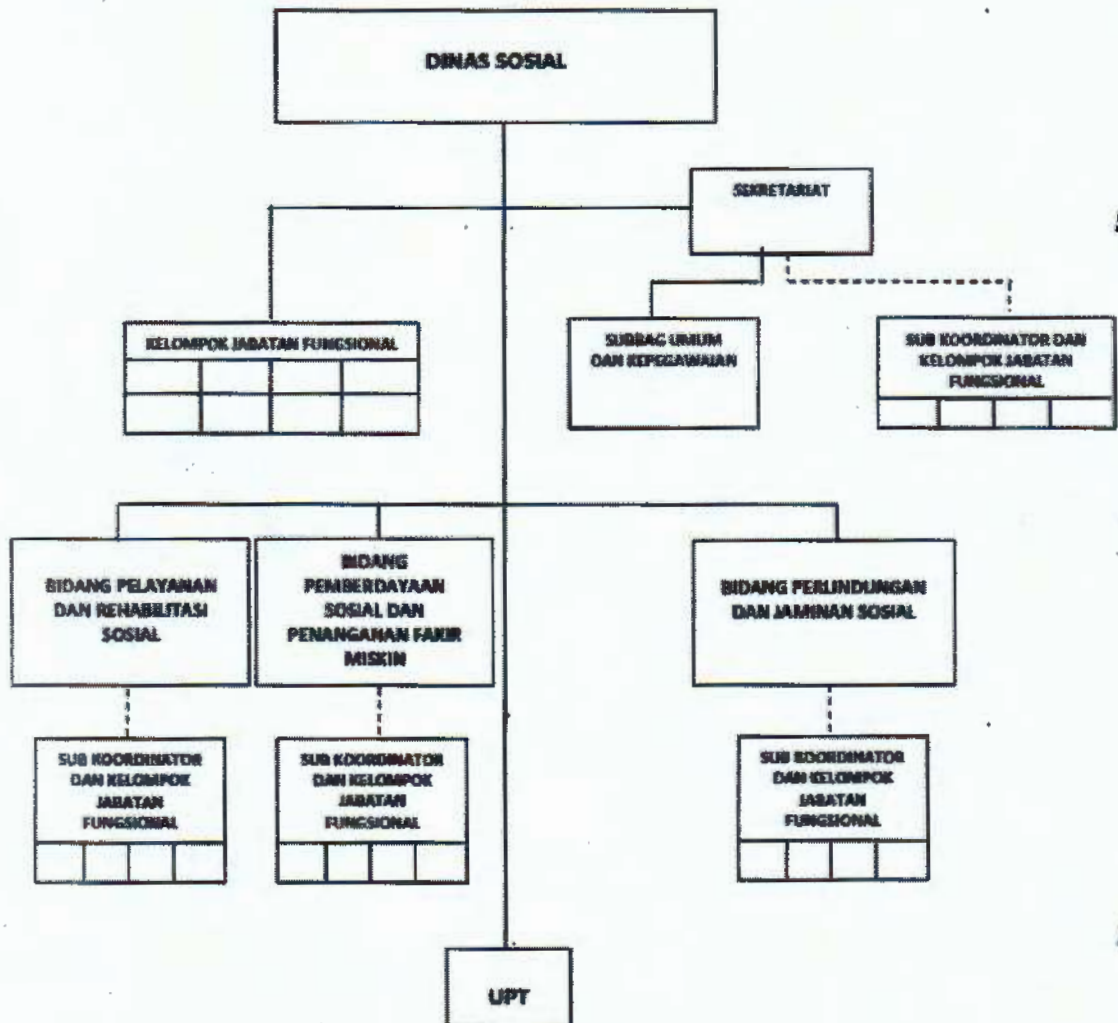
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan Jaminan yang membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Sosial;
 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Bimbingan Lanjut; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, yang membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

2. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan KAT; dan
 3. Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan sosial.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 149 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN**



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan memiliki Pegawai sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) ASN dan 24 (dua puluh empat) Non ASN. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi dijelaskan sebagaimana table berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja Dinas Sosial	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan						
		L	P		SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S-1	S-2	
1.	Kepala Dinas	1		1							1
2.	Sekretariat	12	9	21			9			11	1
3.	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	3	4	7			1			4	2
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	6	3	9			1			7	1
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	6	4	10			5	1		3	1
JUMLAH		28	20	48			16	1		25	6

Tabel 2
 Sumber Daya ASN Berdasarkan Nilai Indeks Profesionalitas ASN
 Dinas Sosial Tahun 2023

DIMENSI / INDIKATOR					SKOR
JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	
Pimpinan Tinggi Pratama	20	20	25	5	70
Administrator	15	15	25	5	60
Administrator	20	0	25	5	50
Administrator	15	0	25	5	45
Administrator	20	15	25	5	65
Pengawas	15	0	25	5	45
Fungsional Muda	15	15	25	5	60
Fungsional Muda	15	15	25	5	60
Fungsional Muda	15	15	25	5	60
Fungsional Muda	15	15	25	5	60
Fungsional Muda	20	15	25	5	65
Fungsional Muda	20	15	25	5	65
Fungsional Muda	15	15	25	5	60
Fungsional Muda	15	15	25	5	60
Fungsional Muda	15	15	25	5	60
RATA- RATA IP ASN					60

Sumber Daya Non Aparatur Berbasis Masyarakat

Dinas Sosial juga memiliki SDM dengan status non aparaturnya atau pendamping sosial berbasis masyarakat / relawan sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, dan pendamping sosial lainnya yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah Kecamatan atau Desa/Kelurahan. Keberadaan SDM tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jenis SDM Berbasis Masyarakat	Kedudukan	Regulasi
1.	Pendamping PKH	Kab.Pasuruan	UU NO.11/2009
2.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kabupaten dan Kecamatan	Permensos No.3/2013
3.	Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial / Sakti Peksos	Dinas Sosial Kab.Pasuruan	Permensos No. 15 A/2010
4.	Pendamping Sosial KUBE	Kelompok KUBE	UU NO.13/2011
5.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Kabupaten dan Kecamatan	Kepermensos No.28/1987
6.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Kabupaten dan Kecamatan	Permensos 29/2011

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan selama tahun 2018-2023

CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2018-2023										
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					Target					
Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas, Kelangkaan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rumus = $\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		6,49	6,40	6,00	5,70	5,20		4,70
			Jumlah Penduduk	1.616.578	1.627.928	1.639.278	1.650.628	1.661.979		
			Jumlah PMKS	104.916	104.187	98.357	94.085	86.210		
			PROSENTASE REALISASI %	6,48%	6,40%	6,00%	5,70%	5,19%		4,70%
	1. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Perlindungan Jaminan Sosial Masyarakat.	1. Prosentase Peningkatan Pelayanan Perlindungan Jaminan Sosial Masyarakat.		99,90	99,91	85,60	85,65	85,70		85,75
	Rumus = $\frac{\text{Jumlah PMKS Dilayani}}{\text{Jumlah PMKS Yang Menerima Pelayanan}} \times 100\%$	JML PMKS DILAYANI	104.706	104.000	72.089	69.021	63.873		0	
		JML PMKS YG MENGAJUKAN PELAYANAN	104.811	104.094	84.198	80.584	74.064		0	
		PROSENTASE REALISASI %	99,90%	99,90%	85,60%	85,65%	86,24%	100,63%		
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Nilai SAKIP				75	80		81	
		REALISASI				73,06	73,28		No Data	
1.CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN	PENURUNAN JUMLAH PMKS DR 21-22	7.876	0,01%							
	PERTAMBAHAN PENDUDUK 21-22	11.351								
2. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	MENURUNNYA PMKS DILAYANI	5.148	0,63%							
	MENURUNNYA PMKS MENGAJUKAN PELAYANAN PELAYANAN	6.520								

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di tampilkan dalam table dibawah ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2024 - 2026**

NAMA PD : DINAS SOSIAL
TUGAS : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Bidang Sosial Serta Tugas Pamanusiaan
FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial
 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial
 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Sosial
 5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	KETERANGAN/ PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya jaminan sosial bagi masyarakat miskin		Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}} \times 100\%$	Kepala Dinas
2		Meningkatnya layanan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Miskin	Persentase PPKS miskin yang terpenuhi perlindungan sosial dan jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS Miskin yang terpenuhi perlindungan dan jaminan sosial}}{\text{Jumlah PPKS Miskin}} \times 100\%$	Kepala Dinas
			Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS (Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, dan Gelandangan Pengemis)	$\frac{\text{Jumlah PPKS (Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, dan Gelandangan Pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (di luar panti)}}{\text{Jumlah PPKS Diluar Panti}} \times 100\%$	
			Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Korban Bencana Alam Kabupaten}} \times 100\%$	

Tabel T-C 23.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indikator Tujuan (Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial)	%		6,40	6,00	5,70	5,20	4,70	6,40	6,00	5,70	5,19	4,70	100,00	100,00	100,00	100,01	100,00
2	Indikator Sasaran (Persentase PPKS miskin yang terpenuhi perlindungan sosial dan jaminan sosial)	%		99,90	99,91	85,65	85,70	85,75	99,90	99,91	85,65	86,24	85,75	100,00	100,00	100,00	100,63	100,00
	Indikator Sasaran (Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, dan Gelandangan Pengemis)	%		null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
	Indikator Sasaran (Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam)	%		null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
3	Indikator Standar Pelayanan Minimum (Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti)	%		null	null	null			null	null	null			null	null	null		

	Indikator Standar Pelayanan Minimum (Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti)	%		null	null	null			null	null	null			null	null	null		
	Indikator Standar Pelayanan Minimum (Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di Luar Panti)	%		null	null	null			null	null	null			null	null	null		
	Indikator Standar Pelayanan Minimum (Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti)	%		null	null	null			null	null	null			null	null	null		
	Indikator Standar Pelayanan Minimum (Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana)	%		null	null	null			null	null	null			null	null	null		
4	Indikator IKK Outcome (Persentase Pengandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti)	%		null	null	null			null	null	null			null	null	null		
	Indikator IKK Outcome (Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%		null	null	null			null	null	null			null	null	null		

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Pasuruan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TAHUN 2019																	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.244.893.500					1.149.490.194					92,34						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000					7.500.000					100						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.000.000					126.288.759					79,93						
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.733.500					71.981.400					81,12						
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	478.860.000					449.350.000					93,84						
Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.100.000					49.825.000					99,45						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000					34.989.000					99,97						
Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000					39.970.000					99,93						
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	244.800.000					244.766.035					99,99						
Penyediaan Jasa Perkantoran	141.900.000					124.820.000					87,96						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	658.210.550					637.246.775					96,82						
Pengadaan Mebelair	65.000.000					65.000.000					100						
Pengadaan Peralatan Kantor	102.710.550					88.808.750					86,47						
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	230.000.000					228.066.000					99,16						
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	230.000.000					224.872.025					97,77						
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	30.500.000					30.500.000					100,00						
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.625.000					9.600.000					99,74						

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0			0			0								
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	9.625.000			9.600.000			99,74								
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	79.395.000			79.395.000			100								
Pendidikan dan Pelatihan Formal	79.395.000			79.395.000			100								
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000			39.726.450			99,32								
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000			39.726.450			99,32								
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	238.720.000			238.708.946			100								
Penanganan Lansia dan Peringatan HALUN	238.720.000			238.708.946			100,00								
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (KELUARGA FAKIR MISKIN)	483.846.250			423.748.198			87,58								
Pemberdayaan WRSE (Monev Jadub)	18.796.250			12.782.000			68,00								
Pemberdayaan Keluarga Rentan (Pendampingan KUBE)	10.000.000			9.950.000			99,50								
Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin (BPNT)	340.000.000			287.244.000			84,48								
Operasional Sembako	115.050.000			113.772.198			98,89								
PROGRAM PELESTARIAN NILAI NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	594.181.000			586.975.630			98,79								
Pemeliharaan dan Rehab Taman Makam Pahlawan (TMP)	228.631.000			224.994.400			98,41								
Penghargaan dan bantuan sosial bagi pahlawan dan pejuang (sarasehan dan bansos)	365.550.000			361.981.230			99,02								
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT	553.812.000			520.745.000			94,03								
Pemantapan pekerja sosial masyarakat (PSM) terkait dengan pendataan PMKS	501.212.000			491.695.000			98,10								
Pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna	52.600.000			29.050.000			55,23								
PROGRAM PENINGKATAN PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	333.750.000			309.578.550			92,76								
Verifikasi dan Validasi BDT	236.150.000			218.085.000			92,35								

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		130.800.000				117.662.957					89,96				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		33.652.500				33.652.500					100				
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		477.540.000				469.860.000					98,39				
Penyediaan Alat Tulis Kantor		39.516.000				39.496.800					100				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		26.426.000				26.426.000					100				
Penyediaan Makanan dan Minuman		30.000.000				30.000.000					100				
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		75.000.000				74.975.150					100				
Penyediaan Jasa Perkantoran		128.900.000				114.485.000					88,82				
Pengembangan Sumber Daya Aparatur		30.571.000				30.571.000					100				
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan		47.302.795				23.045.795					48,72				
Penyediaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu		0				0					0				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		475.044.005				472.418.950					99				
Pengadaan Mebelair		4.500.000				4.500.000					100				
Pengadaan Peralatan Kantor		65.442.000				65.442.000					100				
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		193.500.505				193.041.000					100				
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		195.364.000				193.210.950					98,90				
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor		16.237.500				16.225.000					100				
PROGRAM FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.278.351.675				1.234.652.031					96,58				
Pemberdayaan WRSE (Monev Jadub dan RTLH)		9.616.375				0					0				
Pemeliharaan dan Rehab Taman Makam Pahlawan (TMP)		126.983.500				122.513.431					96,48				
Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat Terkait Dengan Pendataan PMKS		490.667.600				478.097.000					97,44				
Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna		0				0					0				
Verval BDT		234.530.000				224.793.800					95,85				
Pendataan PMKS dan PSKS		93.130.000				92.856.800					100				
Penghargaan dan Bantuan Sosial Bagi Pahlawan, Perintis dan Pejuang (Serasehan dan Bansos)		123.075.000				122.825.000					100				
Pemberdayaan Keluarga Rentan (Pendampingan KUBE)		5.349.200				4.635.000					86,65				

Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin (BPNT)		0				0				0				
Operasional Sembako		195.000.000				188.931.000				96,89				
PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL		584.004.700				268.425.800				45,96				
Pelayanan Pantai Anak		2.993.000				2.984.400				100				
Pelayanan dan Bimbingan Sosial Anak Terlantar		116.293.700				58.600.600				50,39				
Tetirah Anak		0				0				0,00				
Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS Hasil Razia (Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial dan Anak Jalanan)		175.700.000				107.054.000				60,93				
Penanganan Lansia dan Peringatan HALUN		118.343.000				24.636.800				20,82				
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Bimbingan Lanjut eks. Klien		152.555.000				75.150.000				49,26				
Rehabilitasi eks. Narapidana		18.120.000				0				0				
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		887.953.731				841.736.354				94,80				
Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		469.528.155				462.114.868				98,42				
Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial		36.216.536				28.797.236				79,51				
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat		228.475.000				219.175.000				95,93				
Perlindungan Sosial bagi pekerja migran bermasalah dan korban tindak kekerasan / perlakuan salah		0				0				0,00				
Penanganan dan perlindungan sosial bagi orang terlantar		18.402.000				5.690.000				30,92				
Pemulihan dan Perlindungan Sosial eks. Korban Bencana		135.332.040				125.959.250				93,07				
TAHUN 2021-2022														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.294.808.754	5.255.624.480				5.082.619.789,00	1.261.952.141,00			95,99	24,01	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.840.479	15.745.000				29.705.800,00	14.720.000,00			100	93	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.465.409	0			12.352.500,00	0			99,09	0		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17.375.070	15.745.000			17.353.300,00	14.720.000			100	93		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0			0	0			0	0		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.318.467.996	4.305.784.744			4.150.775.524,00	1.084.032.207,00			96,12	25,18		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.829.467.996	3.784.207.000			3.671.075.524,00	965.009.583			95,86	25,50		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		489.000.000	521.577.744			479.700.000,00	119.022.624			98,10	22,82		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		161.675.260	373.072.836			161.387.900,00	84.359.135,00			100	23		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		44.959.420	118.057.002			44.744.800,00	56.990.150			100	49		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		24.998.050	33.881.980			24.950.050,00	3.379.490			100	10		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		44.999.790	65.973.854			44.981.550,00	14.825.495			100	22		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		46.718.000	157.160.000			46.711.500,00	9.184.000			100	6		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		227.272.800	0			225.000.000,00	0,00			99,00	0		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		227.272.800	0			225.000.000,00	0			99,00	0		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		333.025.199	287.148.634			293.366.368,00	32.697.349			88,09	11,39		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.500.000	6.000.000			5.496.000,00	0			100	0		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		158.788.974	146.999.907			125.157.368,00	31.227.349			78,82	21,24		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		73.556.225	49.848.727			73.053.000,00	1.470.000			99,32	2,95		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		95.180.000	84.300.000			89.660.000,00	0			94,20	0,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		224.527.020	273.873.266			222.384.197,00	46.143.450,00			99,05	16,85		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		214.447.500	263.758.436			212.364.197,00	45.143.450			99,03	17,12		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10.079.520	10.114.830			10.020.000,00	1.000.000			99,41	9,89		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		556.872.910	7.023.557.208			533.882.300,00	333.012.005,00			95,87	4,74		
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		49.587.220	6.150.593.304			27.373.000,00	54.442.555,00			55,20	0,89		

Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT			49.587.220	6.150.593.304			27.373.000,00	54.442.555			55,20	0,89		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			507.285.690	872.963.904			506.509.300,00	278.569.450,00			100	31,91		
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			478.800.000	405.710.830			478.039.000,00	99.872.500			100	24,62		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			28.485.690	467.253.074			28.470.300,00	178.696.950			100	38,24		
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			0	0			0	0			0	0		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			0	0			0,00	0,00			0	0		
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			0	0			0,00	0,00			0	0		
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			0	0			0,00	0,00			0	0		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.639.399.280	1.299.090.390			1.582.671.250,00	180.544.480,00			96,54	13,90		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.558.458.080	1.221.332.600			1.511.912.740,00	163.719.800,00			97,01	13,41		
Penyediaan Permakanan			1.377.500.000	859.583.830			1.332.978.940,00	0			96,77	0,00		
Penyediaan Alat Bantu			0	65.198.640			0,00	7.282.000			0	0		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			79.775.000	79.759.730			78.085.840,00	875.000			97,88	1,10		
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			101.183.080	216.790.400			100.847.960,00	155.562.800			100	71,78		

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantai Sosial		80.941.200	77.757.790			70.758.516,00	16.824.680,00				87,42	21,64		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		0	0			0	0				0	0		
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		75.079.500	77.757.790			64.906.010,00	16.824.680				86,45	21,64		
Pemberian Layanan Rujukan		5.861.700	0			5.852.500,00	0				100	0		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		584.197.460	8.210.083.798			578.811.797,00	319.365.699				99,08	3,89		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		584.197.460	8.210.083.798			578.811.797,00	319.365.699				99,08	3,89		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		236.715.650	404.213.798			236.647.335,00	116.765.699				100	28,89		
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		327.827.070	7.805.870.000			322.585.390,00	202.600.000				98,40	2,60		
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		19.654.740	0			19.579.072,00	0				100	#DIV/0!		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		212.894.240	991.588.630			207.310.695,00	111.828.400				97,38	11,28		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		45.468.040	495.728.920			45.425.495,00	24.907.000				100	5,02		
Penyediaan Makanan		37.925.540	133.168.920			37.900.975,00	15.207.000				100	11,42		
Pelayanan Dukungan Psikososial		7.542.500	362.560.000			7.524.520,00	9.700.000				100	2,68		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kelempagaan Bencana Kabupaten/Kota		167.426.200	495.859.710			161.885.200,00	86.921.400				97	17,53		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		0	0			0	0				0	0		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		167.426.200	495.859.710			161.885.200,00	86.921.400				96,69	17,53		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		168.345.136	132.199.995			166.358.276,00	34.137.423,00				98,82	25,82		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		168.345.136	132.199.995			166.358.276,00	34.137.423,00				98,82	25,82		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		168.345.136	132.199.995			166.358.276,00	34.137.423				98,82	25,82		

TAHUN 2023															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.927.752.384										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.003.663										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					25.003.663										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.140.657.587										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.619.083.587										
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					521.574.000										
Administrasi Umum Perangkat Daerah					298.367.574										
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					47.956.514										
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					33.881.980										
Facilitasi Kunjungan Tamu					65.997.580										
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.531.500										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.059.983										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.000.000										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					141.211.256										
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40.848.727										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					87.000.000										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188.663.577										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					175.192.647										
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					13.470.930										
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					188.212.932										

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					79.799.632														
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT					59.641.632														
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT					20.158.000														
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					12.000.200														
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Grabs Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					12.000.200														
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					96.413.100														
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					24.000.000														
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					24.000.000														
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					19.805.000														
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					18.000.100														
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					10.608.000														
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.220.604.990														
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial					1.119.512.300														
Penyediaan Permakanan					1.005.128.830														
Penyediaan Alat Bantu					27.008.640														
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					24.349.830														

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					63.025.000															
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					101.092.690															
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					50.000.000															
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA					51.092.690															
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					141.190.947															
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					141.190.947															
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					2.000.000															
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					135.190.947															
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					2.000.000															
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					2.000.000															
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					119.795.760															
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					32.692.000															
Penyediaan Makanan					16.692.000															
Penyediaan Sandang					2.000.000															
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					2.000.000															
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					2.000.000															
Pelayanan Dukungan Psikososial					10.000.000															
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Keslapstiasaan Bencana Kabupaten/Kota					87.103.760															
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					2.000.000															

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					85.103.760													
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					33.335.670													
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					33.335.670													
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					7.999.970													
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					13.199.900													
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					12.135.800													

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

2.3.1 Urusan Sosial

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin rentan, perlu layanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerintah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta rehabilitasi sosial.

Pengurangan penduduk miskin dan rentan oleh Dinas Sosial dilaksanakan melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, dan kemampuan dalam menghadapi situasi kritis dalam upaya mengurangi perbaikan kualitas hidup penduduk miskin dan rentan yang diantaranya diimplementasikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, penanganan keterlantaran anak serta ketuna sosialan khususnya gelandangan dan pengemis terlantar. Pengelompokan PPKS akan dijelaskan lebih lanjut dalam table berikut :

Tabel 3 Pengelompokan PPKS berdasarkan Penduduk hasil Penelitian Bappenas

NO.	KELOMPOK PPKS	PERINCIAN
1	2	3
1.	Penduduk Terlantar	Balita terlantar Anak Terlantar usis 6-16 Tahun Lansia terlantar 60 Th keatas
2.	Penduduk Penyandang Disabilitas	Anak dengan disabilitas Penduduk dengan disabilitas usia 18 th keatas
3.	Penduduk Miskin	Fakir miskin Perempuan rawan sosial ekonomi
4.	Penduduk Miskin tidak berdomisili tetap / <i>homeless</i>	Gelandangan Pengemis Anak jalanan Pemulung
5.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Komunitas adat terpencil
6.	Penduduk Korban Bencana	Korban bencana alam

		Korban bencana sosial Korban bencana / guncangan ekonomi
7.	Penduduk Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi	Anak korban tindak kekerasan Korban tindak kekerasan usia 18 th ketas Wanita tuna Susila Korban trafficking Pekerja migran bermasalah
8.	Penduduk Marjinal	Anak berhadapan dengan hukum Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya ODHA Kelompok minoritas Pekerja lepas Keluarga bermasalah sosial psikologis Korban NAPZA

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial, Dinas Sosial bekerjasama / bermitra dengan stakeholder antara lain :

1.	Bank BNI	penyaluran bantuan sosial kepada keluarga miskin melalui program PKH
2.	Bank Jatim	Penyaluran BLT bagi buruh rokok dan petani tembakau yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), asistensi penyandang disabilitas dan penyaluran dampak inflasi BBM bagi disabilitas
3.	Kantor Pos	Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Sembako/BPNT
4.	Dinas Kesehatan	Surat Keterangan Kesehatan sebagai lampiran penerbitan rekomendasi bagi tuna sosial yang selanjutnya akan di berikan layanan rujukan
5.	Badan Pusat Statistik & Dispenduk Capil	Dalam pemadanan data penerima bantuan sosial dengan berbasis Data NIK (Nomor Induk Kependudukan)
6.	BPJS Kesehatan & Ketenaga Kerjaan	Dalam reaktivasi penerima bantuan iuran (PBI)

7.	DP3AP2KB	Berkoordinasi sebagai Tim manakala terjadi korban kekerasan pada anak atau rehabilitasi sosial anak
8.	POLRES	Berkoordinasi apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait korban tindak kekerasan dan NAPZA
9.	SATPOL PP	Penanganan Razia gelandangan pengemis, anak terlantar, anak jalanan, Wanita tuna Susila, dan korban trafficking
10.	BPBD	Menangani korban bencana alam dalam rangka perlindungan dan penyelamatan serta pencegahan terjadinya permasalahan sosial
11.	UPT Dinas Sosial Provinsi Jatim dan Panti Asuhan swasta	Sebagai mitra / Lembaga kesejahteraan sosial

2.3.2 Kondisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kategori penerima manfaat dalam penyelenggaraan sosial ini antara lain :

1. Anak meliputi Balita, anak terlantar, anak putus sekolah, anak jalanan, cacat/disabilitas anak yang diperdagangkan dan anak yang berada dalam situasi darurat (memerlukan perlindungan khusus)
2. Penyandang disabilitas (anak dan dewasa)
3. Tuna Sosial
4. Lanjut Usia Terlantar (lansia)
5. Korban Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)

PPKS tersebut merupakan warga miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dengan pendekatan pekerja sosial / *assessment* , Dinas Sosial melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya sebagai warga negara.

2.3.3 Kondisi Pelayanan Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia

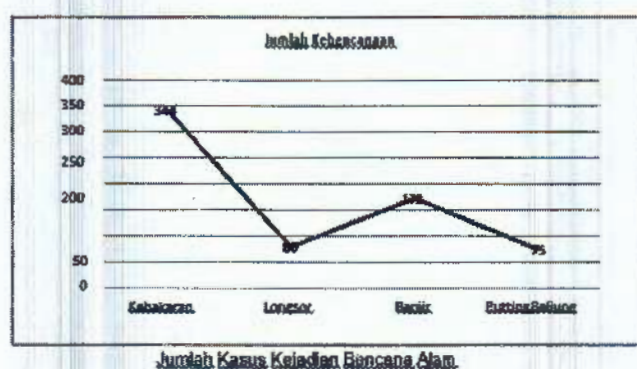
Jenis kecacatan yang di tangani seksi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas bidang lanjut yaitu tuna netra, cacat mental, cacat tubuh, cacat grahika, tuna laras, tuna ungu, wicara dan penyakit kronis. Program kegiatan pelayanan sosial untuk rehabilitasi sosial penyandang cacat di arahkan untuk :

1. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas dengan tarap kesejahteraan sosial penyandang cacat
2. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dengan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat
3. Mendapat batuan sosial setiap bulan bagi penyandang cacat berat melalui jaminan sosial
4. Meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang cacat terhadap fasilitas pendidikan kesehatan, pelayanan kesos dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya.

2.3.4 Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Berkenanan permasalahan penanganan bencana alam merupakan upaya kemanusiaan diberikan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk menimalisasi jumlah korban dan menegah terjadinya permasalahan sosial dan dan dinas sosial melalui kasi perlindungan sosial dan korban bencana alam mempunyai tanggung jawab baik terhadap perorangan, kelompok masyarakat, bencana banjir dan lonsor adalah kasus yang sering terjadi setiap tahun di kabupaten pasuruan.

Gambar Grafik Kebencanaan Tahun 2022-2023



Dalam penanggulangan Bencana secara terpadu dilakukan kegiatan :

1. Kesiapsiagaan Bencana dan Penaggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
2. Tanggap Darurat
3. Pasca Bencana

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketuna sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat Sebagian warga masyarakat yang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS). Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pasuruan yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2024-2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu

2024-2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2024-2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan

global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius.

Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya. Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.

Dalam pelaksanaan urusan sosial di Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dialami sebagai berikut :

- a) Pemahaman staf tentang peraturan – peraturan yang melandasi tugas dan fungsi organisasi masih rendah sehingga pencapaian tujuan belum maksimal
- b) Masih rendahnya kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c) Masih rendahnya mutu profesionalisme pelayanan sosial untuk mengembangkan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, sehingga peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat masih perlu ditingkatkan
- d) Belum terwujudnya keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah- masalah sosial sehingga menyebabkan belum terwujud ketahanan sosial masyarakat dan belum terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan

pembangunan dan perubahan yang cepat melalui wadah jaringan kerja

- e) Belum maksimalnya kualitas program penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat sehingga berdampak bagi pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- f) Belum maksimalnya identifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentu kebijakan masalah-masalah sosial

ANALISA SWOT

Penilaian terhadap kondisi organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa **SWOT** dengan melibatkan seluruh *stakeholder* melalui diskusi dua arah.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*stenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada Dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

1.1 Kekuatan (*Strenght*)

- Adanya peraturan perundang – undangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dibidang Sosial berdasakan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Sosial;
- Tersedianya mitra kerja lembaga kesejahteraan sosial Pemerintah dan Swasta seperti antara lain : UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Swasta.
- Adanya sumber – sumber potensi kesejahteraan masyarakat, dunia pendidikan maupun dunia usaha.

1.2 Kelemahan (*Weakness*)

- Kurangnya sarana dan prasarana penanganan kesejahteraan sosial;

- Terbatasnya tenaga fungsional maupun struktural di bidang kesejahteraan sosial;
- Rendahnya kualitas pendidikan dan ketrampilan sumber daya manusia (SDM).

2. Analisis Lingkungan Eksternal

2.1 Kesempatan (*Opportunities*)

- Mulai meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial;
- Dukungan anggaran APBD Kabupaten Pasuruan;

2.2 Ancaman (*Threats*)

- Meningkatnya jumlah penduduk;
- Munculnya permasalahan baru terkait dengan perkembangan teknologi;

3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan

Dengan memperhatikan faktor kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang dihadapi dari lingkungan startegis, maka Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan akan mewujudkan hal – hal sebagai berikut:

- a) Membangun kerjasama kemitraan antara Pemerintah Pusat / Daerah, Swasta dan masyarakat dalam penanganan PPKS;
- b) Mendayagunakan dan meningkatkan partisipasi PPKS dalam dunia kerja maupun berkehidupan sosial di masyarakat;
- c) Sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan PPKS.
- d) Membangun sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

3.2 Penentuan Isu Strategis

Berkaitan dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka isu strategis yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya penduduk miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial;
2. Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti;
3. Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam;
4. Validasi data pemberdayaan dan fakir miskin;
5. Meningkatkan kemampuan potensi pekerja sosial;
6. Rendahnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
7. Penanganan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada :Cascading Kinerja Dinas Sosial

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya jaminan sosial bagi masyarakat miskin		Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	4,6	4,5	4,4
		Meningkatnya layanan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Miskin	Persentase PPKS miskin yang terpenuhi perlindungan sosial dan jaminan sosial	20%	25%	30%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS (Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, dan Gelandangan Pengemis)	80%	81%	81%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam	25%	27%	28%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,3	80,4	80,5

Definisi Operasional dan formulasi tentang table

- Formulasi Perhitungan **tujuan** diperoleh dari Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2024 dibagi dengan Jumlah Penduduk Tahun 2024 dikalikan seratus persen, perhitungan dalam angka diilustrasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jmlh PMKS}}{\text{Jmlh Penduduk}} \times 100\% = \text{Nilai Target Tujuan IKU}$$

- Formulasi Perhitungan **sasaran** diperoleh dari Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilayani Tahun 2024 dibagi dengan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengajukan pelayanan Tahun 2024 dikalikan seratus persen, perhitungan dalam angka diilustrasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jmlh PMKS Dilayani}}{\text{Jmlh PMKS Yg Mengajukan Pelayanan}} \times 100\% = \text{Nilai Target Sasaran IKU}$$

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya jaminan sosial bagi masyarakat miskin	Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1 Meningkatnya layanan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi PPKS (Pemertu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Miskin	1 Persentase PPKS miskin yang terpenuhi perlindungan sosial dan jaminan sosial 2 Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS (Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, dan Gelandangan Pengemis)	1 Mengembangkan Pola Pelayanan bagi PPKS yang lebih berkuwalitas 2 Mengembangkan pola ke mitraan dan pemberdayaan masyarakat PPKS	1 Pengembangan Pelayanan PPKS dengan Pemanfaatan teknologi. 2 Meberi pelayanan dengan bantuan Stimulan, bantuan Sosial lainnya serta penguatan modal bagi PPKS 3 Memeberikan Pelayanan Lansung untuk melindugi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PPKS 4 Pembinaan dan pengembangan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, serta dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial. 5 Pengembangan perlindungan dan jaminan sosial serta strategi penyandang sumber dana sosial
		2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS SOSIAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya jaminan sosial bagi masyarakat miskin				Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial											
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PS)	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	100%	7.358.827.091	100%	7.865.028.446	100%	8.048.278.968	100%	8.048.278.968	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada perencanaan, anggaran, dan evaluasi	100%	100%	114.494.000	100%	128.218.700	100%	128.229.835	100%	128.229.835	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	32.200.000	6 Dokumen	33.810.000	6 Dokumen	35.500.500	6 Dokumen	35.500.500		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.250.000	4 Dokumen	5.512.500	4 Dokumen	5.512.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.250.000	4 Dokumen	5.512.500	4 Dokumen	5.512.500		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.250.000	4 Dokumen	5.512.500	4 Dokumen	5.512.500		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.250.000	4 Dokumen	5.512.500	4 Dokumen	5.512.500		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	26.250.000	1 Laporan	27.562.500	1 Laporan	27.562.500		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	37.294.000	1 Laporan	39.158.700	1 Laporan	41.116.635	1 Laporan	41.116.635		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat bertanggung jawab	100	100	4.241.490.587	100	4.463.533.816	100	4.676.216.297	100	4.876.216.297	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/Bulan	300 Orang/Bulan	3.619.083.587	300 Orang/Bulan	3.800.037.766	300 Orang/Bulan	3.990.039.655	300 Orang/Bulan	3.990.039.655		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324 Dokumen	324 Dokumen	574.377.000	324 Dokumen	603.095.850	324 Dokumen	633.250.643	324 Dokumen	633.250.643		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	23.000.000	2 Laporan	24.150.000	2 Laporan	25.357.500	2 Laporan	25.357.500		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	36 Laporan	36 Laporan	25.000.000	36 Laporan	26.250.000	36 Laporan	27.562.500	36 Laporan	27.562.500		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	44.450.000	100%	46.672.500	100%	49.008.125	100%	49.008.125	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	11.200.000	5 Dokumen	11.760.000	5 Dokumen	12.348.000	5 Dokumen	12.348.000		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000	1 Dokumen	1.837.500	1 Dokumen	1.929.375	1 Dokumen	1.929.375		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000	12 Laporan	22.050.000	12 Laporan	23.152.500	12 Laporan	23.152.500		
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	10.500.000	50 Dokumen	11.025.000	50 Dokumen	11.576.250	50 Dokumen	11.576.250		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai kebutuhan	100%	100%	275.345.000	100%	289.112.250	100%	303.567.863	100%	303.567.863	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.875.000	1 Paket	8.268.750	1 Paket	8.268.750		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	6.720.000	4 Dokumen	7.056.000	4 Dokumen	7.408.800	4 Dokumen	7.408.800		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000	4 Dokumen	4.725.000	4 Dokumen	4.961.250	4 Dokumen	4.961.250		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	6.625.000	4 Dokumen	6.956.250	4 Dokumen	7.304.063	4 Dokumen	7.304.063		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	250.000.000	25 Orang	262.500.000	25 Orang	275.625.000	25 Orang	275.625.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	100%	425.807.574	100%	447.166.833	100%	468.519.000	100%	468.519.000	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.000.000	2 Paket	3.150.000	2 Paket	3.307.500	2 Paket	3.307.500		
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	47.956.514	10 Paket	50.354.340	10 Paket	52.872.057	10 Paket	52.872.057		
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	33.881.980	10 Paket	35.576.079	10 Paket	37.354.883	10 Paket	37.354.883		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	65.997.580	30 Laporan	69.297.459	30 Laporan	72.762.332	30 Laporan	72.762.332		
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	72 Laporan	150.531.500	72 Laporan	158.058.075	72 Laporan	165.960.979	72 Laporan	165.960.979		
		6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	4.500.000	5 Dokumen	4.725.000	5 Dokumen	4.961.250	5 Dokumen	4.961.250		
		7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	126.000.000	1 Dokumen	132.300.000	1 Dokumen	132.300.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang direalisasi	100%	100%	1.025.280.000	100%	1.076.460.000	100%	1.130.283.000	100%	1.130.283.000	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang di sediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	350.000.000	2 Unit	367.500.000	2 Unit	385.875.000	2 Unit	385.875.000		
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	420.000.000	4 Unit	441.000.000	4 Unit	463.050.000	4 Unit	463.050.000		
		3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	3.000.000	2 Unit	3.150.000	2 Unit	3.307.500	2 Unit	3.307.500		
		4	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	35 Unit	164.000.000	35 Unit	172.200.000	35 Unit	180.810.000	35 Unit	180.810.000		
		5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3.200.000	1 Unit	3.360.000	1 Unit	3.528.000	1 Unit	3.528.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	60.000.000	1 Unit	63.000.000	1 Unit	66.150.000	1 Unit	66.150.000		
		7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	25.000.000	3 Unit	26.250.000	3 Unit	27.562.500	3 Unit	27.562.500		
			Penyediaan Jasa Persewaan dan Penyediaan Ruang Kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	100%	308.299.800	100%	324.448.990	100%	340.671.398	100%	340.671.398	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan	7.000.000	1000 Laporan	7.350.000	1000 Laporan	7.717.500	1000 Laporan	7.717.500		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	156.999.000	36 Laporan	164.848.950	36 Laporan	173.091.398	36 Laporan	173.091.398		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	49.840.000	10 Laporan	52.332.000	10 Laporan	54.948.600	10 Laporan	54.948.600		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	95.160.000	12 Laporan	99.918.000	12 Laporan	104.913.900	12 Laporan	104.913.900		
			Pembelian Barang dan Jasa	Persentase BMD kondisi baik	100%	100%	854.219.930	100%	907.421.477	100%	952.792.398	100%	952.792.398	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	263.740.000	20 Unit	276.927.000	20 Unit	290.773.350	20 Unit	290.773.350		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	380.000.000	16 Unit	399.000.000	16 Unit	418.950.000	16 Unit	418.950.000		
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.250.000	2 Unit	5.512.500	2 Unit	5.512.500		
		4	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	25.000.000	1 Unit	26.250.000	1 Unit	27.562.500	1 Unit	27.562.500		
		5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	2.000.000	4 Unit	2.100.000	4 Unit	2.205.000	4 Unit	2.205.000		
		6	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	175.000.000	1 Unit	183.750.000	1 Unit	192.937.500	1 Unit	192.937.500		
		7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	13.470.930	1 Unit	14.144.477	1 Unit	14.851.700	1 Unit	14.851.700		
Meningkatnya jaminan sosial bagi masyarakat miskin				Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial											
	Meningkatnya layanan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan)			Persentase PPKS miskin yang terpenuhi perlindungan sosial dan jaminan sosial											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
	n Sosial) Miskin														
				Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS (Penyanggah disabilitas terlanjar, Anak terlanjar, Lansia terlanjar, dan Gelandangan Pengemis)											
				Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam											
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (P1)	Persentase Penerima bantuan sosial sesuai data DTKS	100%	100%	378.900.000	100%	384.800.000	100%	414.540.000	100%	414.540.000	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang Valid	100%	100%	378.900.000	100%	384.800.000	100%	414.540.000	100%	414.540.000	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1 Orang	1 Orang	1.000.000	1 Orang	1.050.000	1 Orang	1.102.500	1 Orang	1.102.500		
			Pengelolaan Data fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten / kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota yang di data	86.571 Keluarga	86.571 Keluarga	212.000.000	86.571 Keluarga	222.600.000	86.571 Keluarga	233.730.000	86.571 Keluarga	233.730.000		
			Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	86.571 Keluarga	86.571 Keluarga	162.000.000	86.571 Keluarga	170.100.000	86.571 Keluarga	178.605.000	86.571 Keluarga	178.605.000		
			Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	1.000.000	1 Orang	1.050.000	1 Orang	1.102.500	1 Orang	1.102.500		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA (P2)	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	1.328.200.000	100%	1.391.200.000	100%	1.480.812.500	100%	1.480.812.500	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	730.000.000	100%	787.000.000	100%	826.875.000	100%	826.875.000	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	1500 Orang	250.000.000	1500 Orang	262.500.000	1500 Orang	275.625.000	1500 Orang	275.625.000		
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100 Orang	105.000.000	100 Orang	110.250.000	100 Orang	110.250.000		
			Penyediaan Tempat Pengungsian Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit	100 Unit	250.000.000	100 Unit	262.500.000	100 Unit	275.625.000	100 Unit	275.625.000		
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	50.000.000	100 Orang	52.500.000	100 Orang	55.125.000	100 Orang	55.125.000		
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100 Orang	105.000.000	100 Orang	110.250.000	100 Orang	110.250.000		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kemampuan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kegiatan di kampung Bencana	100%	100%	575.000.000	100%	603.750.000	100%	633.937.500	100%	633.937.500	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	3 Kampung	225.000.000	3 Kampung	236.250.000	3 Kampung	248.062.500	3 Kampung	248.062.500		
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	350.000.000	100 Orang	367.500.000	100 Orang	385.875.000	100 Orang	385.875.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (P2)	Persentase masyarakat miskin yang di bdayakan	100%	100%	2.180.000.000	100%	2.289.000.000	100%	2.403.450.000	100%	2.403.450.000	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga miskin yang mendapatkan manfaat	100%	100%	300.000.000	100%	315.000.000	100%	330.750.000	100%	330.750.000	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Keluarga	290 Keluarga	225.000.000	290 Keluarga	236.250.000	290 Keluarga	248.062.500	290 Keluarga	248.062.500		
			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Keluarga	25 Keluarga	75.000.000	25 Keluarga	78.750.000	25 Keluarga	82.687.500	25 Keluarga	82.687.500		
			Pengumpulan Bantuan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bantuan yang tersalurkan	100%	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	55.125.000	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	52.500.000	4 Dokumen	55.125.000	4 Dokumen	55.125.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Orang yang mendapatkan Pelayanan	100%	100%	1.830.000.000	100%	1.921.500.000	100%	2.017.575.000	100%	2.017.575.000	Diras Sosial	Kab. Pasuruan
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	350.000.000	24 Orang	367.500.000	24 Orang	385.875.000	24 Orang	385.875.000		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	450.000.000	24 Orang	472.500.000	24 Orang	496.125.000	24 Orang	496.125.000		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	365 Keluarga	365 Keluarga	150.000.000	365 Keluarga	157.500.000	365 Keluarga	165.375.000	365 Keluarga	165.375.000		
			Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	12 Lembaga	875.000.000	12 Lembaga	918.750.000	12 Lembaga	964.687.500	12 Lembaga	964.687.500		
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat	15 Sertifikat	5.000.000	15 Sertifikat	5.250.000	15 Sertifikat	5.512.500	15 Sertifikat	5.512.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Cepalan pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM (P2)	Persentase TMP yang dikelola sesuai dengan standart	100%	100%	450.500.000	100%	473.025.000	100%	496.676.250	100%	496.676.250	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%	100%	450.500.000	100%	473.025.000	100%	496.676.250	100%	496.676.250	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000	11 Dokumen	52.500.000	11 Dokumen	55.125.000	11 Dokumen	55.125.000		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 Makam	11 Makam	300.000.000	11 Makam	315.000.000	11 Makam	330.750.000	11 Makam	330.750.000		
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.500.000	12 Laporan	105.525.000	12 Laporan	110.801.250	12 Laporan	110.801.250		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (P1)	Persentase PPKS yang memerlukan Rehabilitasi	100%	100%	1.963.702.160	100%	2.061.887.268	100%	2.164.981.631	100%	2.164.981.631	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi	100%	100%	1.534.469.470	100%	1.611.192.944	100%	1.691.752.591	100%	1.691.752.591	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2405 orang	2405 orang	1.012.050.000	2405 orang	1.062.652.500	2405 orang	1.115.785.125	2405 orang	1.115.785.125		
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	240 orang	240 orang	49.500.000	240 orang	51.975.000	240 orang	54.573.750	240 orang	54.573.750		
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	27.008.640	15 Orang	28.359.072	15 Orang	29.777.026	15 Orang	29.777.026		
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	26.260.000	20 orang	27.573.000	20 orang	28.951.650	20 orang	28.951.650		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Anak	280 Anak	24.349.830	280 Anak	25.567.322	280 Anak	26.845.688	280 Anak	26.845.688		
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	315 Orang	315 Orang	63.025.000	315 Orang	66.176.250	315 Orang	69.485.063	315 Orang	69.485.063		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	31.770.000	100 orang	33.358.500	100 orang	35.026.425	100 orang	35.026.425		
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	17.870.000	50 orang	18.763.500	50 orang	19.701.675	50 orang	19.701.675		
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	365 orang	365 orang	197.193.000	365 orang	207.052.650	365 orang	217.405.283	365 orang	217.405.283		
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	60 orang	4.774.000	60 orang	5.012.700	60 orang	5.263.335	60 orang	5.263.335		
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	60 orang	1.834.000	60 orang	1.925.700	60 orang	2.021.985	60 orang	2.021.985		
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	75 orang	78.835.000	75 orang	82.776.750	75 orang	86.915.588	75 orang	86.915.588		
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Keajaiban Sosial (PMKS) Lainnya Sisa Korban HIV/AIDS dan MAPZA di Luar Pantiseseit	Persentase pemenuh yang mendapatkan Pelayanan rehabilitasi sosial	100%	100%	426.232.880	100%	458.894.445	100%	473.229.841	100%	473.229.841	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang	24 orang	9.976.000	24 orang	10.474.800	24 orang	10.998.540	24 orang	10.998.540		
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	60 orang	4.774.000	60 orang	5.012.700	60 orang	5.263.335	60 orang	5.263.335		
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang	24 orang	37.152.000	24 orang	39.009.600	24 orang	40.960.080	24 orang	40.960.080		
			Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang	24 orang	7.200.000	24 orang	7.560.000	24 orang	7.938.000	24 orang	7.938.000		
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang	24 orang	122.800.000	24 orang	128.940.000	24 orang	135.387.000	24 orang	135.387.000		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang	24 orang	3.000.000	24 orang	3.150.000	24 orang	3.307.500	24 orang	3.307.500		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	50.000.000	75 Orang	52.500.000	75 Orang	55.125.000	75 Orang	55.125.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	51.092.890	75 Orang	53.647.325	75 Orang	56.329.691	75 Orang	56.329.691		
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	75 orang	23.327.500	75 orang	24.493.875	75 orang	25.718.569	75 orang	25.718.569		
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	15.000.000	75 Orang	15.750.000	75 Orang	16.537.500	75 Orang	16.537.500		
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	32.472.800	75 Orang	34.096.230	75 Orang	35.801.042	75 Orang	35.801.042		
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	34.800.000	75 Orang	36.540.000	75 Orang	38.367.000	75 Orang	38.367.000		
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	37.000.000	30 Orang	38.850.000	30 Orang	40.792.500	30 Orang	40.792.500		
			Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	30 Dokumen	30 Dokumen	637.900	30 Dokumen	669.795	30 Dokumen	703.285	30 Dokumen	703.285		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (PK)	Pemulanan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	500.000	100%	525.000	100%	551.250	100%	551.250	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase terpenuhinya fasilitas pemulangan warga negara migran korban kekerasan	100%	100%	500.000	100%	525.000	100%	551.250	100%	551.250	Dinas Sosial	Kab. Pasuruan
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2 Orang	2 Orang	500.000	2 Orang	525.000	2 Orang	551.250	2 Orang	551.250		
JUMLAH							13.595.729.251		14.275.515.714		14.989.291.499		14.989.291.499		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Tabel T-C.28

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD			Kondisi Kinerja pada akhir periode RKPD 2026
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Fokus Layanan Wajib					
13.	Urusan Sosial					
13.1	Presentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	4,6	4,5	4,4	4,4
13.2	Presentase Peningkatan Pelayanan Perlindungan Jaminan Sosial Masyarakat	%	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan ini diupayakan secara perumusan optimal dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh aparat jajaran Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2024-2026. Oleh karena itu untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal perlu adanya kesungguhan dan komunikatif yang sebaik-baiknya dari semua pihak yang terkait.

Memperhatikan situasi dan kondisi politik sosial budaya keamanan yang dinamik dengan tingkat pergerakan perubahan yang cepat yang mengakibatkan tingkat intensitas permasalahan kesejahteraan sosial cukup tinggi dan sulit diprediksi, maka perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi diluar kemampuan perkiraan. Keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 kedepan sangat tergantung dari sikap, etika serta profesionalisme aparatur dengan didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha (Stakeholders).

Penyusunan Renstra ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam menentukan arah dan kebijakan serta sasaran yang hendak dicapai, sehingga kritik, saran kami dibutuhkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Demikian Rencana Strategis Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang dapat kami susun sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

BAB VIII
P E N U T U P

Penyusunan Review Renstra Dinas Sosial 2024 - 2026 dimaksudkan untuk merevisi target dan capaian kinerja pada Tahun berjalan sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan dan sebagai pedoman OPD Dinas Sosial dalam melaksanakan Program kegiatan agar sesuai dengan Renstra Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis 2024-2026 Dinas Sosial digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Semoga dengan disusunnya review Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Dinas Sosial. Demikian penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Dinas Sosial disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF